

Abstrak

Setiap pemerintah daerah memiliki kepala daerah dan wakil yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil “pilkada” merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal. Setiap daerah wajib mengalokasikan dana hibah pemilu untuk KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim untuk penyelenggaraan pilkada. Seperti halnya, kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020 yang menyelenggarakan pilkada serentak. Tiga diantaranya meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas keuangan dan dampak hibah terhadap kemampuan di tiga daerah tersebut dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis diagram pohon. Berdasarkan data yang diperoleh, ketiga daerah tersebut masih belum mampu membiayai pengeluaran hibah ini. Terlihat dari kapasitas fiskal daerah dan kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga daerah tersebut, Kota Magelang memiliki kemandirian fiskal daerah yang paling tinggi tetapi indeks kapasitas fiskal daerah paling rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa: 1) Masalah utama penelitian ini adalah ketidakmampuan daerah melaksanakan belanja hibah pilkada. 2) Penyebab masalah utama dalam penelitian ini karena kapasitas fiskal daerah rendah, total belanja hibah pilkada tinggi, serta IPM dan PDRB per kapita rendah. 3) Efek dari masalah utama yaitu pengurangan pos belanja hibah daerah, pergeseran pengalokasian dana, dan kebutuhan pelaksanaan “pilkada” perlu dukungan peralatan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma agar tidak membebani daerah dan menimbulkan kontra-produksi bagi ketiga daerah tersebut.

Kata Kunci: Belanja Hibah, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Kemampuan Keuangan Daerah, Analisis Diagram Pohon

Abstract

Each regional government has a regional head and deputy who are directly elected by the people in one pair of candidates. The general election for regional heads and representatives “pilkada” is one form of fiscal decentralization. Each region is obliged to budget election grant funds to the KPU, Bawaslu, Polres, and Kodim for the implementation of the pilkada. For example, districts/cities in Central Java in 2020 are holding simultaneous local elections. Three of them are Sukoharjo Regency, Purworejo Regency, and Magelang City. This research aims to analyze the financial capacity and impact of grants on capacity in the three areas using quantitative and qualitative methods. The data obtained were then analyzed using tree diagram analysis. Based on the data obtained, the three regions are still unable to finance the expenditure of this grant. It can be seen from the regional fiscal capacity and regional financial independence which are still low. The results of this research indicate that of the three regions, Magelang City has the highest regional fiscal independence but the lowest regional fiscal capacity index. Therefore, it can be concluded that: 1) The main problem of this research is the inability of the regions to spend on pilkada grants. 2) The main problem in this research is the low fiscal capacity of the regions, the high total expenditure on regional election grants, and the low HDI and GRDP per capita. 3) The effect of the main problem, namely the reduction of regional grant expenditures, shifts in the allocation of funds, and the need for the implementation of “pilkada” requires equipment support from the Central Government. Therefore, a paradigm shift is needed so as not to burden the regions and cause counter-production for the three regions.

Keywords: Grant Spending, Regional Head Election, Regional Financial Capacity, Tree Diagram Analysis